

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Situasi pemilihan kepala daerah tahun (Pilkada) 2020 ini berbeda dari Pilkada sebelumnya karena diselimuti pandemi Covid-19 yang membahayakan nyawa masyarakat apabila membentuk suatu kerumunan.¹ Dilema antara keberlangsungan demokrasi lokal dengan kesehatan masyarakat karena dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum menempatkan masa yang cukup banyak seperti dimulai dari kampanye sampai hari pemungutan suara. Untuk menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Opsi penundaan Pilkada yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 Desember 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 kemudian menetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020.² Perdebatan-perdebatan di kalangan masyarakat terjadi pro dan kontra mengenai keberlanjutan Pilkada 2020 ditengah pandemi yang telah disampaikan oleh GNPf Ulama dalam wawancara onlinenya.

“Kita akan terus berjuang sampai akhir, PN kan belum menyidangkan gugatan kita, jadi masih berharap PN berpikir jernih, dan juga Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-

¹ Dalam rangka upaya penanggulangan maka dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial (Social Distancing)

² Putri Hergianasari. Electoral Distancing. 2020. Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 01 No. 1. Hal 113

gara anak dan menantunya maju pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat, tidak diperhatikan,"

Dengan tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 menuai kontra dari berbagai pihak dan banyak kalangan masyarakat yang merasa kepentingan kesehatan masyarakat lebih penting daripada tetap berlanjutnya Pilkada 2020 yang nanti akan mengambil banyak resiko seperti banyaknya kasus positif di Indonesia. Diantara yang menyatakan kontra mengenai Pilkada 2020 ini adalah GNPf Ulama³ dan Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) yang bahkan GNPf Ulama Sumatera Utara, sudah melakukan gugatan ke pengadilan negeri Medan dan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan dalam wawancara media onlinenya

Belum lagi kritikan dari Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kepada wartawan yang mengkritik mengenai protokol kesehatan ketika pendaftaran cakada ke KPU, protokol kesehatan itu tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai aturan.

“Yang jelas, dari peristiwa tanggal 4-6 September saat pendaftaran cakada ke KPU, protokol kesehatan itu tidak berjalan. Sekarang 'protokol yang ketat' itu seperti apa?”

Dari beberapa kutipan wawancara mengenai pro dan kontra akan keberlangsungan Pilkada 2020. Pemerintahan tetap memutuskan dan membulatkan tekad mengenai pemilihan kepala daerah 2020 tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan dan mempertimbangkan jika ditunda lagi pandemi Covid-19 ini belum tentu akan usai mungkin bisa saja berlangsung 2-3 tahun. Dan menganggap Pilkada tidak bisa ditunda selama itu. Hal ini disampaikan

³ Gerakan Nasional Pengawal Fatwa

dan dibacakan oleh ketua komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku pimpinan rapat dalam rapat kerja di komisi II DPR dalam wawancara onlinenya

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19,”⁴

Dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah 2020 di tengah pandemi tentu memiliki resiko yang tinggi seperti apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan maka akan besar kemungkinan kasus positif Covid-19 lebih tinggi dikarenakan pada tahap pemungutan suara tentu masyarakat akan melakukan mobilitas yang tinggi dan bertemu orang banyak, apalagi petugas yang lalai dengan prokes dapat mengakibatkan kasus melonjak naik. Selanjutnya resiko apabila Pilkada 2020 ditengah pandemi tetap dilaksanakan adalah partisipasi pemilih akan menurun jika masyarakat yang takut tertular Covid-19 lebih memilih berdiam diri dirumah daripada pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan resiko tertular virus.

Pemilu demokratis yang terbaik dicirikan oleh angka partisipasi pemilih yang tinggi. Penyelenggaraan pemilu selama pandemi ini dapat mengganggu aspek demokrasi karena dapat mengurangi angka partisipasi politik. Masyarakat yang lebih memperhatikan dan mementingkan kesehatan anggota keluarganya akan kecil kemungkinan mereka untuk memilih dan bahkan tidak akan ikut berpartisipasi

⁴<https://news.detik.com/berita/d-5184047/pro-kontra-pilkada-serentak-2020-tetap-digelar-di-tengah-wabah> diakses pada 19 September 2021 pukul 09.31 WIB.

dalam pemilihan kepala daerah 2020 bisa saja terjadi. Oleh karena itu, legitimasi kontestasi dapat dirusak dengan partisipasi yang tidak merata.⁵

Dalam kamus politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dengan secara langsung atau tidak secara langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁶ Sejatinya partisipasi politik dalam pemilu bisa menjadi sarana mengontrol jalannya pemerintahan pemilihan untuk masyarakat. Komunitas maupun individu memiliki hak dan suara untuk memutuskan apakah pemerintah yang akan memimpinya layak dan dapat dipercaya untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya.

Dari banyaknya faktor atau alasan yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, menurut Ramlan Surbakti⁷ beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik diantaranya ialah yang pertama, kesadaran politik, masyarakat yang kurang menyadari hak dan kewajiban warga negara melibatkan pemahaman seseorang tentang lingkungan sosial dan politik, serta kepentingan dan kepedulian seseorang terhadap komunitas dan lingkungan politik tempat mereka tinggal.

⁵ Ingrid Bicu, Peter Wolf. 2020. Pemilu selama COVID-19: Pertimbangan tentang Bagaimana Melanjutkan dengan Hati-Hati. *International IDEA's*

⁶ Miriam Budiardjo.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 367

⁷ Ramlan Surbakti. 1992.*Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kedua, kepercayaan kepada pemerintah. penilaian seseorang terhadap pemerintah, terlepas dari apakah dia yakin bahwa pemerintah dapat dipercaya dalam merumuskan kebijakan atau melaksanakan pemerintah dan apakah dapat terpengaruh. Biasanya kepercayaan masyarakat sering diuji apabila pejabat/politisi yang memberikan janji pada mereka namun tidak ditepati dapat membuat *trust* nya pada pemerintahan sudah tidak *respect*. Ketiga, situasi menurut Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi *actor* secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, ancaman dan ancaman disini dapat berupa nyawa masyarakat itu sendiri.

Situasi politik Indonesia tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana keadaan bumi pertiwi saat ini mengalami pandemi selama sembilan bulan lamanya juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam ikut serta pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah, mengingat satu bulan terakhir sebelum pilkada dilaksanakan puncak kasus masyarakat yang positif terus naik dan kurva bahkan tidak landai dalam keadaan Indonesia. Pada tanggal 9 November 2020 kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 2.853 kasus baru, total kasus terkonfirmasi saat itu sudah mencapai 440.569 kasus semenjak virus corona mewabah di Indonesia.⁸ Tetapi Sumatera Barat yang salah satu provinsi ikut serta dalam pemilihan kepala daerah baru dengan sebelas kabupaten, dua kota yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah saat itu ditandai dengan zona *orange*, yang mana beberapa bulan sebelum diadakannya Pilkada serentak kota Padang sebagai

⁸Sebaran Virus Corona Indonesia 9 November: 2.853 Kasus Baru, 716 dari DKI <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5247690/sebaran-virus-corona-indonesia-9-november-2853-kasus-baru-716-dari-dki> diakses pada 23 agustus 2021, pukul 10.11 WIB

Ibu Kota Sumatera Barat sempat mengalami di zona merah yang memiliki tingkat penyebaran virus corona sangat tinggi dan banyaknya tambahan kasus positif di daerah tersebut.

Dua minggu sebelum tanggal 9 Desember 2020 Pilkada serentak di Sumatera Barat ada beberapa Kabupaten/Kota yang tingkat penyebaran virus Covid-19 cukup tinggi meskipun tidak ditetapkan sebagai zona merah.⁹ Kabupaten Agam salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan Pilkada berada di zona kuning dengan resiko rendah dan skala nilai Kabupaten Agam (skor 2,03).



⁹ Zona merah resiko tertinggi dengan skala nilai (Skor 0 - 1,8). Zona orange resiko sedang dengan skala nilai (Skor 1,81 - 2,40), zona kuning resiko rendah dengan skala nilai (Skor 2,41 - 3,0), terakhir zona hijau dengan ditandai tidak ada kasus. Ada 13 kabupaten/kota yang berada di zona orange diantaranya Kabupaten Pasaman Barat (skor 2,40) Kota Sawahlunto (skor 2,39) Kabupaten Pasaman (skor 2,34) Kota Padang (skor 2,31) Kabupaten Dharmasraya (skor 2,28) Kabupaten Pesisir Selatan (skor 2,18) Kabupaten Padang Pariaman (skor 2,16) Kabupaten Tanah Datar (skor 2,04) Kabupaten Limapuluh Kota (skor 1,93) Kota Padang Panjang (skor 1,90) Kota Solok (skor 1,84) Kabupaten Solok (skor 1,84).

Tabel 1. 1 Persentase Angka Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota 2020 Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Penduduk jiwa	DPT	Angka persentase partisipasi
1.	Agam	524.906	365.029	53,33%
2.	Pesisir selatan	518.265	331.260	68,28%
3.	Padang Pariaman	462.125	304.654	54,08%
4.	Pasaman Barat	428.641	250.723	70,27%
5.	Solok	375.802	281.902	75,05%
6.	Lima Puluh Kota	374.067	269.605	62,76%
7.	Tanah Datar	366.136	276.615	55,87%
8.	Pasaman	315.470	199.836	66,05%
9.	Dharmasraya	205.127	143.907	78,13%
10.	Solok selatan	177.462	114.161	81,70%
11.	Kota Bukittinggi	115.986	81.447	72,04%
12.	Sijunjung	234.444	156.361	70,98%
13.	Kota Solok	68.241	47.418	75,71%

Sumber : Data dari Aplikasi KPU

Tabel 1. 2 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2015, 2010, 2020 di Kab Agam

No	Kabupaten/Kota	Pilgub 2010	Pilgub 2015	Pilgub 2020
1.	AGAM	58,48%	54,57%	53,33%

Sumber : Data dari KPU Agam

Tabel 1. 3 Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2010,2015,2020 di Tanjung Mutiara

No	Kecamatan	Pilgub 2010	Pilgub 2015	Pilgub 2020
1	Tanjung Mutiara	60,14%	56,26%	47,13%

Sumber : Data dari KPU Agam

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan pergantian kepala daerah Bupati dan Gubernur 2020. Dengan 16 Kecamatan, 82 Nagari, dan 467 Jorong dengan Ibu Kota yang terletak di Lubuk Basung. Kabupaten Agam memiliki persentase paling rendah yaitu 53,33% diantara 12 Kabupaten/Kota lainnya yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wali Kota. Angka ini tentu jauh

tertinggal dari harapan KPU dalam tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 yaitu senilai 77,75%. Dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya tahun 2015 angka partisipasi masyarakat Kabupaten Agam lebih tinggi satu persen dari tahun 2020 ini yaitu 54,57%. Melihat fenomena ini dalam setiap kali periode Pilkada persentase partisipasi pemilih cenderung menurun sedangkan di beberapa daerah partisipasi pemilih cenderung naik. Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, Kecamatan yang memiliki persentase partisipasi pemilih paling rendah adalah Kecamatan Tanjung Mutiara dengan angka 47,133 % yang bahkan tidak mencapai 50%.

Khususnya di Tanjung Mutiara ini juga mengalami fenomena yang menarik dikarenakan dilihat berdasarkan data yang ada persentase partisipasi pemilih di Kecamatan Tanjung Mutiara mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga terakhir 2020 yang mana Pilkada 2020 ini hal faktor yang sangat mendukung hal ini terjadi yaitu situasi Covid-19 yang membahayakan nyawa masyarakat. selain hal itu tentu ada faktor lain yang dapat mendukung rendahnya persentase partisipasi pemilih di Kecamatan Tanjung Mutiara seperti status sosial dan ekonomi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Tanjung Mutiara, Armidawati

:

“saya memilih kemarin bukan karena saya kepala sekolah saya harus memilih bukan, itu kan hanya status dan pekerjaan yang tidak bisa dibawa saat pemilihan dan selama ini mengenai status sosial seperti itu juga tidak dibedakan di tps jangan hanya karena saya kepala sekolah atau bapak kepala dinas saat memilih biliknya dibedakan tidak ada yang seperti itu, kan tadi saya sampaikan saya memilih karena ini hanya ada satu kali dalam lima tahun jadi apa salahnya kita memilihkan walaupun yang saya pilih tidak menang”

Mengutip dari hasil wawancara peneliti dengan Armidawati yang mana status pekerjaannya adalah seorang Kepala Sekolah, dalam wawancara bersama Armidawati ia memilih dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020 kemarin bukan karena status pekerjaan atau kedudukannya dalam bermasyarakat namun dikarenakan kesadaran dari diri Armidawati sendiri dikarenakan memilih calon pemimpin hanya dilakukan selama lima tahun sekali. Jadi status sosial bukanlah faktor dari penyebab rendahnya partisipasi pemilih hal ini juga disampaikan oleh Nona yang merasa status sosial bukanlah penghalang untuk datang ke TPS saat Pilkada 2020 kemarin :

“untuk status sosial indak, awak kan samo se sadonyo semua orang buliah mamiliahkan tukang sate, guru, dosen, petani kan ndak ado lo dibeda-bedakannyo dek urang disiko do, tingga kesadaran urang se lai nyo kalo ambo kan lah ambo jalehan baa ndak mamiliah tadi kan”
(untuk status sosial tidak, kitakan sama semuanya, semua orang dibolehkan memilih, tukang, guru, dosen, petani kan semua tidak dibeda-bedakan sama orang disini, hanya saja kesadaran orang saja lagi, kalau saya kan sudah saya jelaskan kenapa tidak memilih tadi.)

Jadi status sosial atau kedudukan seseorang di mata masyarakat bukan menjadi faktor penyebab dari rendahnya partisipasi pemilih saat pemilihan kepala daerah pada 2020 karena berdasarkan hasil wawancara bersama Nona mengatakan semuanya orang itu sama dimata politik apapun pekerjaannya sama saja dan juga

saat di TPS juga tidak akan dibedakan tempat pemilihanya meskipun ia seorang tukang atau pedagang maupun orang kaya sekalipun.

Kajian mengenai partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 tentu sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Christine Diah Wahyuningsih¹⁰ dan Toni Anwar Mahmud¹¹ sudah melakukan penelitian mengenai partisipasi pemilih di Pilkada 2020 dengan mengatakan bahwasanya tidak ada pengaruh pandemi Covid-19 yang cukup besar pada partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 kemarin dengan dibuktikan bahwasanya tingkat partisipasi pemilih naik.

Dengan begitu perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Christine Diah Wahyuningsih¹² dan Toni Anwar Mahmud¹³ adalah peneliti tidak melihat dan menemukan bahwasanya pada era pandemi tidak membuat masyarakat takut untuk pergi ke TPS dengan ditunjukkannya angka partisipasi pemilih naik di daerah tersebut. Sedangkan peneliti melihat bahwasanya masa pandemi menjadi pengaruh signifikan pada partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.

¹⁰ Christine Diah Wahyuningsih. 2021. "Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang" 2, (02) 1–10,

¹¹Toni Anwar Mahmud. 2020 "Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan WaliKota Dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2020," *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya* 4, . (1).

¹²Wahyuningsih, Loc.cit.

¹³Mahmud, Loc.cit

Disamping itu peneliti juga melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Inggried Fena Meyliana dan Dewi Erowati¹⁴ dimana pada penelitian ini memprediksi mengenai partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tana Toraja akan terjadinya penurunan partisipasi pemilih disebabkan karena masih tingginya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi dan pemungutan suara di bulan Desember dimana pada bulan ini juga faktor cuaca cenderung tidak mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehingga dapat menjadi alasan masyarakat untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilihan 9 Desember nanti.

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi politik adalah sikap masyarakat dalam keikutsertaannya untuk menentukan sebuah kebijakan dengan melalui pemilihan umum yang berlangsung. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis adalah dengan banyaknya antusias partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Menurut Miriam Budiardjo¹⁵ partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, akan mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Pada dasarnya bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi dua, yaitu konvensional, bentuk dari partisipasi yang normal pada negara demokrasi meliputi

¹⁴Inggried Fena Meyliana, Dewi Erowati. 2020. "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten TanaToraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020," *Academia Praja* 3,(2): 168–181.

¹⁵ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 367

seperti pemberian suara (*voting*), diskusi politik kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif dan ikut serta pada politik praktis. Yang kedua yaitu non konvensional, suatu bentuk partisipasi politik masyarakat yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi tertentu berupa pengajuan petisi, berdemonstrasi, mogok, melakukan tindak kekerasan politik (perusakan, pengeboman, pembakaran, penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi. Maka pada penelitian ini partisipasi politik yang dimaksud adalah partisipasi konvensional seperti pemberian hak suara pada Pilkada 2020 di Kabupaten Agam, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Tabel 1. 4 Persentase Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Agam Per Kecamatan

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap	Persentase Partisipasi
1.	Ampek angkek	17.384	54.055%
2.	Banuh hampu	26.213	55.152%
3.	Baso	26.517	55.398%
4.	Canduang	18.659	50.217%
5.	IV Angkat Canduang	32.249	52.253%
6.	IV Koto	19.031	52.146%
7.	Kamang	16.625	59.029%
8.	Lubuk basung	58.591	49.557%
9.	Malalak	7.461	50.029%
10.	Matur	14.129	53.571%
11.	Palembayan	24.360	52,256%
12.	Palupuah	10.783	61.272%
13.	Sungai Pua	18.647	52.357%
14.	Tanjung Mutiara	22.373	47.133%
15.	Tanjung Raya	26.067	53.175%
16.	Tilatang Kamang	26.330	56.867%

Sumber: Data Sekunder Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kab Agam

Di Kecamatan Tanjung Mutiara yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Agam dan terdiri dari tiga Nagari diantaranya Tiku Selatan, Tiku Utara, Tiku V Jorong dan delapan belas jorong yang ada mendapati angka

partisipasi paling rendah diantara 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Tanjung mutiara untuk pemilihan bupati Agam 2020 ada sebanyak 22.373 orang. Pada tabel 1.2 pemilihan Bupati Agam yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 tercatat yang menggunakan hak suaranya ada sebanyak 10.547 orang. Artinya ada lebih dari separuh populasi DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 11.826 orang yang golput dan partisipasi pemilih di Kecamatan Tanjung Mutiara pada Pilkada 2020 hanya mencapai 47.133%.

Dari data yang telah peneliti paparkan, dapat dilihat bahwasannya tingkat partisipasi pemilih masyarakat Tanjung Mutiara pada setiap kali pemilihan kepala daerah selalu menurun setiap kali periodenya. Hal tersebut dapat kita lihat dari turunnya jumlah keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2010 hingga tahun 2020. Selain dikarenakan angka Covid-19 yang tinggi saat pelaksanaan Pilkada 2020 tentu ada beberapa alasan kenapa partisipasi pemilih masyarakat Tanjung Mutiara cenderung menurun karena mengingat dari tahun ke tahun setiap kali periode Tanjung Mutiara mengalami penurunan partisipasi pemilih seperti alasan pekerjaan dan alasan teknis lainnya juga dapat menjadi pemicu lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sheila Syafitri Ramadhani, salah satu warga Tanjung Mutiara sekaligus seorang Mahasiswi, ia menyatakan bahwa :

“Memang saat pilkada 2020 kemarin, masyarakat disini jarang ada yang memilih bahkan TPS saja hanya sedikit yang datang, karena covid-19 juga berpengaruh hoax mengenai covid-19 saat itu banyak yang beredar juga tapi saya rasa bukannya covid-19 yang mempengaruhi rendahnya itu pekerjaan atau kesibukan orang juga bisa menjadi penghalang ada, seperti para

nelayan yang tidak ikut memilih karena pekerjaan, TPS tempat memilih juga ada beberapa yang jauh.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Endrawati, salah satu warga Kecamatan Tanjung Mutiara sekaligus Ibu Rumah Tangga, ia menyatakan bahwa:

“Orang malas ke TPS karena jarak TPS nya jauh-jauh disini, dan takut nanti kalau suhu badan kita panas dijadikan covid-19, jadi takutlah masyarakat ke TPS. Dan masyarakat disinikan juga kebanyakan nelayan yang jarang pulang, tidak mungkin pulang hanya untuk memilih ke TPS biayanya banyak”

Penggambaran dari hasil wawancara awal di atas menunjukkan kondisi dan status sosial ekonomi masyarakat kecamatan Tanjung Mutiara dapat membuat masyarakat untuk tidak datang hadir ke TPS saat pemungutan suara seperti yang dikatakan oleh Sheila Syafitri bahwasanya bisa saja masyarakat memiliki kesibukan yang lain dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak dapat menggunakan hak suaranya, ditambah faktor lainnya seperti adanya beredar *hoax* mengenai Covid-19 jika masyarakat yang diukur suhunya melebihi batas maka langsung dijadikan pasien Covid-19 hal ini tentu membuat masyarakat tidak ingin hadir untuk memilih ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwasanya mayoritas kedua masyarakat Tanjung Mutiara memiliki pekerjaan sebagai nelayan yang mana pekerjaannya ke laut selama seminggu dan tidak memungkinkan untuk pulang hanya untuk pergi ke TPS menggunakan hak pilihnya satu hari tersebut.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan adanya penurunan partisipasi pemilih di Kecamatan Tanjung Mutiara setiap kali periode Pilkada dari tahun 2010 ke 2015 dan terakhir 2020 tentu menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dikaji secara mendalam faktor yang mempengaruhi

rendahnya partisipasi pemilih tersebut apalagi pada Pilkada tahun 2020 Indonesia bahkan Dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Peneliti berasumsi bahwasanya rendahnya angka partisipasi pemilih di Kecamatan Tanjung Mutiara ialah karena pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang mana pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia dan masyarakat lebih mementingkan kesehatan keluarga daripada menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah dikarenakan takut untuk pergi ke TPS dan melakukan pemeriksaan Covid-19. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat lebih dalam penyebab rendahnya partisipasi masyarakat kecamatan Tanjung Mutiara pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang cenderung paling rendah daripada kecamatan lainnya, apakah hanya sekedar tidak peduli dengan pemilihan kepala daerah karena mengingat data dari komisi pemilihan umum KPU Agam dimulai saat tahun 2010 diadakan Pilkada sampai Pilkada dua periode terakhir mengalami kemunduran sebab hipotesis yang ada mengatakan bahwasanya apabila angka partisipasi memilih rendah maka kualitas demokrasi lokal dan kualitas pemilu tersebut juga rendah.

Namun situasi Covid-19 atau pekerjaan masyarakat tentu bukan menjadi faktor tunggal yang menjadikan rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Tanjung Mutiara pada Pilkada 2020. Pengaruh hal-hal lain yang dari dalam diri dan luar diri seseorang menentukan keikutsertaan seseorang dalam memilih saat kontestasi pemilihan umum. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih masyarakat pada Pilkada 2020 di kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam saat pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang dan pemaparan rumusan masalah sebelumnya,

maka pertanyaan penelitian ini adalah: **Mengapa partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam rendah?**

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor dari kenapa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam saat pandemi Covid-19.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Terutama mengenai kajian-kajian partisipasi pemilih pada pilkada era pandemi Covid-19. Dan diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 era pandemi ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai rujukan bagi organisasi publik dan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat pada pilkada saat pandemi bagaimana seharusnya diadakan dan memberikan bahan evaluasi untuk pemerintah daerah mengenai angka partisipasi memilih masyarakat yang cenderung rendah dari periode ke periode dan peneliti berharap

penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan oleh KPU agar lebih memperhatikan Kecamatan Tanjung Mutiara lebih intens lagi dalam pemilihan umum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

